



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Raperda Hak Keuangan DPRD Bakal Diubah

Untuk Pimpinan dan Anggota

KOTA-DPRD Sidoarjo sedang mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (raperda) untuk mengubah Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Achmad Muzayyin menyampaikan, perubahan itu menjadi prioritas dalam upaya menyempurnakan peraturan terkait hak keuangan dan administratif para pimpinan dan anggota DPRD.

Materi muatan perubahan dalam raperda ini mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah perubahan nomenklatur kendaraan dinas jabatan menjadi kendaraan perorangan dinas. Selain itu,

raperda tersebut juga akan mengubah ketentuan mengenai pemindahtanganan kendaraan dinas. "Untuk mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan kebutuhan tugas dinas masing-masing," katanya.

Jangka waktu pengembalian kendaraan dinas juga akan mengalami perubahan. Akan lebih sesuai dengan dinas yang diemban. Begitu juga dengan perubahan frasa masa bakti menjadi masa jabatan yang akan memberikan klarifikasi yang lebih tegas.

Selain aspek kendaraan dinas, perubahan juga akan mengenai definisi rumah negara. Hal itu akan memberikan pengertian yang lebih jelas terkait dengan fasilitas yang dapat digunakan oleh para pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam raperda tersebut juga akan ditambahkan penjelasan mengenai kondisi baik dalam penggunaan fasilitas. Serta penjelasan bahwa fasilitas

● Ke Halaman 10



Raperda Hak Keuangan...

tersebut tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD secara bersamaan.

Achmad Muzayyin mengungkapkan bahwa proses penyempurnaan tersebut

akan melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota DPRD. Untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi tugas dan tanggung jawab para pimpinan dan anggota DPRD.

Raperda perubahan Perda Nomor 4

Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih baik dalam mengatur hak keuangan dan administratif para pimpinan dan anggota DPRD. Sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas mereka secara efektif dan efisien. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Raperda Hak Keuangan DPRD Bakal Diubah

Untuk Pimpinan dan Anggota

KOTA-DPRD Sidoarjo sedang mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (raperda) untuk mengubah Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Achmad Muzayyin menyampaikan, perubahan itu menjadi prioritas dalam upaya menyempurnakan peraturan terkait hak keuangan dan administratif para pimpinan dan anggota DPRD.

Materi muatan perubahan dalam raperda ini mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah perubahan nomenklatur kendaraan dinas jabatan menjadi kendaraan perorangan dinas. Selain itu,

raperda tersebut juga akan mengubah ketentuan mengenai pemindahtanganan kendaraan dinas. "Untuk mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan kebutuhan tugas dinas masing-masing," katanya.

Jangka waktu pengembalian kendaraan dinas juga akan mengalami perubahan. Akan lebih sesuai dengan dinas yang diemban. Begitu juga dengan perubahan frasa masa bakti menjadi masa jabatan yang akan memberikan klarifikasi yang lebih tegas.

Selain aspek kendaraan dinas, perubahan juga akan mengenai definisi rumah negara. Hal itu akan memberikan pengertian yang lebih jelas terkait dengan fasilitas yang dapat digunakan oleh para pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam raperda tersebut juga akan ditambahkan penjelasan mengenai kondisi baik dalam penggunaan fasilitas. Serta penjelasan bahwa fasilitas

● Ke Halaman 10



Raperda Hak Keuangan...

tersebut tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD secara bersamaan.

Achmad Muzayyin mengungkapkan bahwa proses penyempurnaan tersebut

akan melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota DPRD. Untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi tugas dan tanggung jawab para pimpinan dan anggota DPRD.

Raperda perubahan Perda Nomor 4

Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih baik dalam mengatur hak keuangan dan administratif para pimpinan dan anggota DPRD. Sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas mereka secara efektif dan efisien. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIMAS MAULANA/JAWA POS

STOK AMAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Bulog Divre Jawa Timur Ermin Tora (kanan) meninjau gudang beras Bulog di Kecamatan Buduran kemarin.

Hari Ini Mulai Bagikan Bantuan Beras ke 86.720 Keluarga Penerima

SIDOARJO – Verifikasi penerima bantuan beras di Sidoarjo tuntas. Total ada 86.720 keluarga penerima manfaat (KPM) di Sidoarjo yang berhak mendapatkan bantuan. Hari ini (14/9) beras bantuan tersebut mulai dibagikan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo A. Misbahul Munir saat mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengecek persediaan beras di gudang Bulog Jatim di Buduran kemarin. Beras dibagikan langsung di balai desa. "Serempak langsung di seluruh desa," katanya. Tiap KPM menerima 10 kilogram beras per bulan. Bantuan diberikan selama tiga bulan pada September, Oktober, dan November.

Beras yang akan dibagikan tersebut kemarin mulai didistribusikan ke tiap desa. Gubernur

Jatim Khofifah melepas langsung pen-distribusian beras tersebut dari gudang Bulog Buduran. Khofifah menyebutkan, di Jatim ada 3,2 juta penerima. Artinya, selama tiga bulan, dibutuhkan 102 ribu ton beras yang harus didistribusikan. Dia memastikan stoknya cukup. "Per bulannya harus mendistribusikan 34 ribu ton karena tiap penerima mendapatkan 10 kilogram," katanya.

Harapannya, bantuan tersebut bisa meringankan masyarakat di tengah harga beras yang masih tinggi. Selain itu, bisa menekan harga di pasar agar tidak terlampaui tinggi. Dia menyebutkan, harga beras masih tinggi karena harga gabah kering giling (GKG) dan gabah kering panen (GKP) juga mengalami kenaikan. (uzi/c12/any)

Jawa Pos

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



BUTUH USAHA EKSTRA: Kendaraan memadati Jalan Abdurrahman, Banjarsari, Kecamatan Buduran, yang menjadi jalur alternatif selama betonisasi kemarin.

Dikelilingi Betonisasi, Warga Damarsi Sulit Beraktivitas

Ketemu Kemacetan di Mana-Mana, Termasuk Jalan Alternatif

SIDOARJO - Saat ini ada tiga proyek di perbatasan Buduran dan Sedati yang sedang digarap. Akibatnya, jalanan di sekitar kawasan itu macet. Ada jalan alternatif yang disiapkan, tapi terlalu sempit. Akibatnya, jika volume lalu lintas tinggi, jalan tersebut juga macet.

Tiga proyek itu adalah betonisasi ruas Jalan Raya Kwangsan sepanjang 1,1 kilometer; betonisasi ruas

Jalan Damarsi-Banjarsari, Buduran, sepanjang 1,8 kilometer; dan pembangunan Jembatan Prasung.

Imbasnya, warga Damarsi, Dukuh Tengah, dan sekitarnya yang akan menuju utara ke Betro harus memutar melewati Jalan Desa Banjarsari, lalu ke utara melintasi Jalan Raden Saleh hingga tembus Betro dan Kwangsan sisi utara. Sayangnya, jalan tersebut sempit. Di Banjarsari, sebagian jalan juga terimbas proyek betonisasi.

Salah seorang warga, Ebta Hadi, mengeluhkan minimnya jalan alternatif. Warga Damarsi yang akan menuju Betro, Sedati, sering terjebak kema-

cetan di Banjarsari. Kalau mau lewat jalan besar, jaraknya terlalu jauh karena harus melewati Jalan Lingkar Timur, setelah itu ke arah Gedangan. "Sore dan pagi jalan-jalan alternatifnya macet karena sempit dan terbatas. Bahkan kadang harus lewat jalan tikus di pinggir sungai," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengakui, kemacetan tidak bisa dihindarkan ketika volume kendaraan tinggi. Namun, pihaknya memastikan warga tidak sampai terisolasi dan tidak bisa ke mana-mana. "Kami mohon maaf kepada

pengguna jalan karena harus lewat jalan alternatif," tuturnya.

Dia menyebut sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat terkait rekayasa dan sosialisasi jalan alternatifnya. Termasuk tetap memberikan akses bagi motor untuk melewati pinggir jalan yang sedang dibeton. "Sosialisasi sudah dilakukan. Warga diberi pemahaman dan tidak sampai ada yang terisolasi," katanya.

Solusinya, pihaknya mempercepat pengerjaan. Dari rencana awal Desember rampung, pihaknya menargetkan akhir November sudah bisa tuntas. Selain itu, tiap jalan yang sudah selesai akan

dibuka lebih dulu. "Ini Jalan Kwangsan di sisi utara sudah selesai, tinggal beremnya. Jadi, bisa dilewati pemotor. Hanya, yang sisi selatan masih garap fondasi sehingga harus ditutup total," ujarnya.

Setelah proses *rigid* beton, baru bisa dibuka tutup jalan menyesuaikan kondisi yang selesai. Betonisasi di Jalan Banjarsari juga dipercepat. "Sementara sebagian jalan di sana masih bisa dilewati. Harapannya bisa meminimalkan kemacetan," katanya.

"Kami upayakan percepatan. Saat ini capaian tiga proyek tersebut sudah melebihi target," tandas Dwi. (uzi/c7/any)

Jawa Pos

3,38 Juta Honorer Tidak Terdaftar

■ Janji Audit Ulang, Men PAN-RB Siapkan Transisi hingga Tahun Depan

■ Tak Ada PHK Massal, Pengangkatan Tunggu UU ASN Rampung

JAKARTA - Pemerintah dihadapkan pada pekerjaan rumah menjelang penghapusan tenaga ho-

noner per November 2023. DPR mengungkap adanya 3,38 juta honorer yang belum terdata.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengaku mendapat banyak aduan soal honorer yang belum terdata pemerintah

▶ Baca 3,38 Juta... Hal 11



ANTARA

Ada 3,38 juta yang tidak terdaftar honorer yang akan diangkat jadi PPPK. Padahal, mayoritas sudah mengabdikan puluhan tahun."

JUNIMART GIRSANG
Wakil ketua Komisi II DPR

Jawa Pos

3,38 Juta Honorer Tidak Terdaftar

Sambungan dari hal 1

Berdasar laporan yang diperoleh, ada sekitar 3,38 juta honorer yang tidak masuk pendataan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan tambahan jumlah itu, menurut dia, total jumlah honorer yang harus menjadi perhatian sekitar 5,6 juta. Sekitar 2,3 juta di antaranya masuk pendataan sebelumnya. "Ada 3,38 juta yang tidak terdaftar honorer yang akan diangkat jadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Padahal, mayoritas sudah mengabdikan puluhan tahun," ungkapnya dalam rapat de-

ngar pendapat (RDP) bersama Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta kemarin (13/9).

Data tersebut secara lengkap telah diserahkan kepada Men PAN-RB untuk ditindaklanjuti. Mulai nama, alamat, hingga jenis pekerjaan honorer saat ini. Pihaknya meminta data ditindaklanjuti dan dipastikan mereka bisa turut diselamatkan dari ancaman penghapusan honorer mulai November 2023.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan menghapus honorer per 28 November 2023. Hal itu sesuai dengan amanat PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang menyatakan tak boleh ada lagi pegawai berstatus honorer di pemerintahan.

Selain soal data, Junimart menyinggung kekhawatiran para honorer terkait permainan data. Yakni, penggantian data para honorer lama dengan nama honorer titipan dan fiktif. "Jadi, mestinya A, tapi diganti orang lain yang dinyatakan masa kerja puluhan tahun, padahal belum pernah jadi honorer. Dan ini sudah terjadi di lapangan," keluhnya. Dia meminta Men PAN-RB betul-betul mengecek data para honorer yang rencananya diangkat menjadi PPPK par waktu melalui RUU ASN yang diundangkan bulan depan.

Dalam kesempatan itu, Anas menjanjikan audit ulang oleh BPKP mengenai data honorer. Dia juga menyinggung soal ketidakvalidan data honorer yang ditemukan dari audit acak

BPKP. "Jadi, kemarin kami meminta audit BPKP secara acak, bahkan yang sudah ditandatangani SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak, Red) saja ada yang tidak valid," ungkapnya.

Merespons hal tersebut, Anas akhirnya menyampaikan ke kepala daerah. Jika nanti data yang disampaikan tidak sesuai lagi, akan berdampak hukum. Karena itu, diharapkan tidak ada lagi penandatanganan SPTJM yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. "Karena pasti akan merugikan teman-teman yang telah mengabdikan lama, disalip dengan yang belum mengabdikan," tegasnya.

Dia menyatakan, audit secara menyeluruh itu tak akan selesai dalam waktu dua bulan sebelum batas

penghapusan honorer. Karena itu, dia menyiapkan skenario masa transisi hingga tahun depan. Para honorer akan tetap "diselamatkan". Namun, ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses audit, yang bersangkutan akan langsung didrop. Dengan catatan, hingga November 2023 tidak diperkenankan memasukkan data baru.

PPPK Kemenag

Tahun ini total ada 39.312 pengangkatan PPPK di Kemenag. Jumlah itu diklaim paling tinggi dibandingkan instansi lainnya. Pelaksanaan orientasi PPPK serentak digelar kemarin (13/9). "Komitmen pemerintah, semua yang tersisa (pegawai honorer, Red) diselesaikan secara bertahap," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

Dia menjelaskan, Kemenag memiliki 129 ribu tenaga honorer. Jumlah itu belum dikurangi 39.312 pegawai yang kini diangkat PPPK. Artinya, masih ada 89.688

honorer. Menag mengusahakan semua dapat diangkat PPPK. Tentu dengan mekanisme yang baru, yakni UU ASN yang kini dalam pembahasan revisi bersama DPR.

Menurut dia, perjuangan mengangkat honorer terus diupayakan. Termasuk menambah jatah kuota PPPK setiap tahun. Hanya, Yaqut belum memaparkan kuota untuk PPPK tahun depan. "Tahun depan kita perjuangan karena butuh kepastian," ucapnya.

Status kepegawaian tersebut juga berdampak pada minimnya jumlah penghulu. Kemenag saat ini hanya memiliki 9 ribu penghulu yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, pernikahan terjadi 2 juta kali dalam setahun. Idealnya harus ada 16 ribu penghulu.

Yaqut menyampaikan, masalah itu akan dikordinasikan dengan Kemen PAN-RB. Karena itu, dalam waktu dekat ada penambahan rekrutmen profesi penghulu di Kemenag. Sebab, kekurangan itu tidak

lain disebabkan status kepegawaian. Mengingat, status penghulu harus sudah PNS.

Seleksi CASN

Kemen PAN-RB diminta mengubah sejumlah regulasi berkaitan dengan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) untuk sarjana diploma. Salah satunya terkait tingkat pangkat dan golongan untuk sarjana diploma yang diterima dalam seleksi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yulianti menyatakan telah berkomunikasi dengan Kemen PAN-RB. Kemen PAN-RB pun disebut sudah *aware* mengenai aduan-aduan yang disampaikan. "Misalnya, rekrutmen D-3. Kalau *nggak* salah di regulasinya (masuk golongan, Red) II-c, sementara sarjana atau sarjana terapan langsung III-a. Itu *kan* (gapnya) terlalu jauh," tuturnya.

Pangkat dan golongan itu penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat dengan gaji dan tunjangan yang diterima ASN. (mia/wan/omy/c19/fal)

Jawa Pos

Dosen dan Mahasiswa PPNS Buat Aplikasi AIS Berbahasa Lokal

SIDOARJO - Dalam rangka penerapan salah satu core value Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) yaitu Setting Down to Earth Result, komitmen ini berfokus pada hasil penelitian PPNS yang “membumi” sehingga bisa cepat diterima masyarakat.

Kelompok mahasiswa dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yakni Muhammad Izzul Haj, Rendy Rizkananda, dan Satriya Kusuma Wardani dibimbing Afif Zuhri Arfianto, S.T., M.T. sebagai dosen pembimbing mampu menghasilkan sebuah aplikasi untuk produk Automatic Identification System (AIS) untuk nelayan tradisional.

Keberhasilan mereka dalam menggabungkan teknologi AIS dengan desain antarmuka yang ramah pengguna membantu meningkatkan interaksi para nelayan yang kesehariannya menggunakan bahasa lokal sehingga memudahkan nelayan menggunakan aplikasi AIS ini.

Melalui program Pekan Ilmiah Mahasiswa Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RI (Kemendikbud Ristek), kelompok mahasiswa tersebut berhasil mendapatkan pendanaan pada kategori PKM-KI (Karya Inovatif).

“Aplikasi ini tentunya bekerja dengan hardware AIS yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk hardware dikerjakan oleh tim dosen, sedangkan software oleh



LOFTI/PUTA

Muhammad Izzul Haj mahasiswa PPNS

juan agar teknologi AIS dapat diakses oleh kalangan lebih luas untuk meningkatkan teknologi keselamatan maritim Indonesia.

Sehingga menjadi sebuah peluang pengembangan yang memungkinkan pengguna menambah fitur atau bahkan mengubah tampilan hingga dari segi bahasa yang akan digunakan, yang ternyata merupakan inovasi yang menarik. Dengan memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dan mempersonalisasikan tampilan aplikasi, hal tersebut tidak hanya memberikan kemudahan penggunaan, namun juga menciptakan peluang penggunaan yang lebih luas dan fleksibilitas yang lebih besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan kelautan.

“Harapan kedepannya, penelitian ini bisa dijadikan untuk pengembangan produk berikutnya yakni AIS Transponder dengan mengedepankan keunggulan yaitu, lebih terjangkau dan lebih mudah digunakan. Pengembangan dari

rosen, sedangkan bermitra oleh tim mahasiswa". Ujar Afif Zuhri Arfianto, Ketua Program Matching Fund 2023 kepada duta.co Selasa(12/9/23)di Sidoarjo.

Lanjut Afif,pada awalnya AIS Polkappals yang merupakan hasil dari program Matching Fund PPNS menjawab tantangan realisasi Peraturan Menteri Perhubungan No.7 Tahun 2019 terkait AIS. Masih terjadinya kecelakaan kapal yang tidak berhasil mengidentifikasi kapal nelayan di sekitarnya mendorong ide untuk melakukan riset produk tersebut.

Namun, masih terdapat kekurangan dalam produk tersebut, yakni aplikasi yang dirasa terlalu rumit untuk digunakan. Melalui program PKM-KI, dikembangkanlah aplikasi untuk produk AIS yang lebih gampang digunakan dan ramah nelayan lokal. Pengembangan tersebut bertu-

segi perangkat lunak juga dapat dikembangkan lebih jauh dengan menysasar target pengguna yang lebih spesifik,"jar Muhammad Izzul Haj dalam wawancara.

Pengembangan aplikasi ini bersamaan dengan penelitian AIS PPNS yang memiliki mitra di Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut membuat pengembangan saat ini menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa sesuai dengan daerah tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan aplikasi ini sangat mendukung untuk dikembangkan menggunakan bahasa lokal target pengguna nantinya. Aplikasi AIS ini memiliki kemiripan penggunaan seperti aplikasi navigasi darat lainnya. Keunggulan utama dari aplikasi ini yakni terletak pada kemampuan untuk menampilkan kapal kapal pengguna AIS di sekitarnya. • Loe

Pemdes Popoh Gelar Musrenbangdes

Sidoarjo, Memorandum

Menyepakati rencana kerja pembangunan (RKP) Pemerintah Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, melaksanakan agenda tahunan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Acara yang dilaksanakan Selasa (12/9) malam, dihadiri oleh Forkopimka Wonoayu, BPD, LPMD, ketua RT/RW, pendamping desa, tokoh masyarakat dan warga desa setempat.

Kepala Desa Popoh Sugini mengatakan, musrenbangdes merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik. Dalam hal ini pemerintah desa bersama BPD, warga dan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. "Terima kasih atas peran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangdes karena momen ini sangat menentukan arah pelaksanaan pembangunan desa mendatang,"

ujarnya.

Dalam pelaksanaan kinerja, pemerintah desa akan transparan dan menjalankannya sesuai prosedur. Termasuk dalam perbaikan tertib administrasi yang akan melibatkan semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Sekretaris Camat Wonoayu Willi Radit Prasetyo menjelaskan, musrenbangdes merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk menentukan pembangunan dan usulan kegiatan 2024 yang tercakup dalam rencana pembangunan yang ada di desa. Berbagai usulan dari desa yang dihasilkan melalui musrenbangdes tentunya juga disesuaikan dengan ketentuan penggunaan, pemanfaatan dan pelaksanaan pembangunan desa melalui dana desa (DD), maupun alokasi dana desa (ADD).

Jadi dalam musrenbangdes untuk menyerap usulan-usu-

lan, yang kemudian masuk dalam perencanaan dan disesuaikan pelaksanaan pembangunannya melalui anggaran DD maupun ADD.

Anita Fulandari selaku pendamping desa menjelaskan, musrenbangdes merupakan forum antarkepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa untuk kedepannya. Musrenbangdes ini dapat menjadi sumber aspirasi warga untuk mengusulkan berbagai program-program pembangunan yang nantinya menjadi usulan pada musrenbang tingkat kecamatan.

"Mudah-mudahan dengan musrenbangdes hari ini, usulan dan aspirasi masyarakat bisa tersampaikan, berbagai program usulan dari desa akan menjadi masukan pada musrenbangdes yang nantinya disesuaikan dengan anggaran, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya. (zam/jok/day)



Musyawah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) di Balai Desa Popoh.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KILAS BIROKRASI

Pendaftaran Eselon II di Kabupaten Sidoarjo Dibuka

Sidoarjo, Bhirawa

PNS Kabupaten Sidoarjo yang sudah golongan IVa, bisa coba-coba mendaftar untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama atau eselon II, yang saat ini sedang dibuka oleh Pemkab Sidoarjo di tahun 2023. Siapa tahu dapat restu dari Dewi Fortuna.

Formasi pendaftaran JPT pratama, yang dibuka, diantaranya, asisten Perekonomian dan pembangunan, Kepala BKD, Kepala Dinas P3AKB, Kadisporapar, dan Kepala Satpol PP.

Plt Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo, Mahmud SH MM, menyampaikan pendaftaran ini telah dibuka sejak 9 September hingga 23 September 2023. Tenggang waktu itu, juga termasuk seleksi administrasi pendaftaran.

“Ketua Panitia seleksinya, Dr Tripitono Adi Prabowo, SE ME, dosen universitas Trunojoyo, Madura,” ujar Mahmud, saat dihubungi Rabu (13/9) kemarin.

Para pendaftar yang lolos administrasi, selanjutnya, sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, akan menjalani penilaian kompetensi manajerial. Juga akan menjalani penilaian kompetensi bidang. Yang meliputi presentasi makalah dan wawancara teknis oleh Pansel.

Pengumuman hasil penilaian kompetensi, nanti akan menetapkan 3 peserta terbaik, pada 25 September 2023. Pada 26 September, peserta akan menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani serta terbebas dari Nafza.

“Pejabat pembina kepegawaian atau PPK akan menetapkan kepala OPD pada 29 September 2023,” ujar Mahmud. Sampai pada Rabu (13/9) sore, menurut data pejabat dari BKD Kabupaten Sidoarjo, masih ada 2 orang pejabat Sidoarjo yang menyerahkan berkas pendaftaran. Namun, tidak disampaikan siapa mereka dan mendaftar sebagai apa.

Sejumlah pejabat eselon III, yang sempat dihubungi, terkesan tidak ikut dalam pendaftaran JPT Pratama, yang dibuka pada tahun 2023 ini.

Pengisian formasi JPT Pratama di Kabupaten Sidoarjo ini, diindaklanjuti proses pelantikan pejabat eselon II, yang sudah dilakukan pada Kamis 7 September 2023 di pendopo Delta Wibawa.

...akan pada Kamis, 7 September 2023, di pendopo Dharma ...
wa, oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. Karena setelah
pelantikan, ada sejumlah jabatan kepala dinas yang kosong, kare-
na rolling dan karena ada yang memasuki masa purna tugas.

Pada saat itu, ada sejumlah pejabat eselon II yang dirolling.
Diantaranya Fredik Suharto- dari staf ahli Bupati menjadi Ka-
bakesbangpol, Noer Rochmawati- dari staf ahli Bupati menjadi
Kepala Diskominfo, Ahmad Zaini- dari asisten administrasi men-
jadi staf ahli Bupati, Mustain Baladan- dari Kabakesbangpol
menjadi staf ahli Bupati, dr Atok Irawan- dari Dirut RSUD menja-
di Asisten Administrasi, drs M.Carda - dari Kasatpol PP menjadi
Kepala Dinas Perikanan dan Sulistianto- dari Kabag yang ada di
Setwan DPRD menjadi Sekretaris Dinas Kominfo. [kus.dre]

HARIAN
Bhirawa
Wala Dharma Bhirawa



Polresta Sidoarjo Peduli Literasi

Ajak Pelajar Gemar Baca

Sidoarjo, Memorandum

Polisi peduli literasi terus digiatkan Polresta Sidoarjo. Anggota Satsamapta Polresta Sidoarjo mengajak pelajar dari SDN Cemengkalang, Sidoarjo ke perpustakaan Mapolresta Sidoarjo, Rabu (13/9).

Kegiatan diawali dengan anggota Satsamapta Polresta Sidoarjo mendatangi sekolah tersebut, lalu mengajak siswa-siswi berkunjung ke Mpolresta Sidoarjo di Jalan Cemengkalang.

Setelahnya para pelajar didampingi guru dipersilakan membaca berbagai koleksi buku bacaan yang ada di sudut baca dan perpustakaan Mall Mini Pelayanan Publik (MMPP) Polresta Sidoarjo. Selain itu, juga diajak keliling sejumlah satuan fungsi Polresta Sidoarjo.

Kasatsamapta Polresta Sidoarjo Kompol Warih Hutomo mengatakan, program Polri Peduli Literasi merupakan upaya Polri memba-



Personel Satsamapta Polresta Sidoarjo mendampingi pelajar SDN Cemengkalang, Sidoarjo, ke perpustakaan Mapolresta Sidoarjo.

ngun generasi yang kaya akan literasi, maupun referensi ilmu. Yakni dengan menggemarkan giat membaca.

"Dengan #PolriPeduliLiterasi dan #PolriCerdaskanBangsa, kami

berharap dapat semakin dekat masyarakat, terutama generasi penerus perjuangan Bangsa. Sehingga mereka mendapatkan khasanah ilmu melalui gemar membaca," jelasnya. (kri/jok/fer)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BPPD

Tempelkan Stiker ke Delapan Reklame Penunggak Pajak

SIDOARJO - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo kemarin (13/9) siang menempelkan stiker bertulisan "objek ini belum membayar pajak" ke delapan titik reklame. Penempelan tersebut dilakukan sebagai peringatan agar pemilik reklame menyelesaikan tunggakan pajaknya.

Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono mengatakan, surat pemberitahuan sudah dilayangkan kepada pemilik reklame, tapi tidak ada tindak lanjut pembayaran. "Sehingga, kami tempel stiker peringatan agar kewajiban pajaknya segera dipenuhi," katanya. Sampai saat ini, total ada 20 wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya. Delapan di antaranya ditemplei stiker kemarin. Sisanya, akan dilanjutkan bergiliran.

Ternyata penempelan stiker membuahkan hasil. Kemarin sore, ada satu wajib pajak yang membayarkan pajaknya. Nilainya sekitar Rp 32 juta. Dengan begitu, hari ini (14/9) stiker pada reklame di sana dicopot.

Jika dirata-rata, ada sekitar 70 wajib pajak yang tiap bulannya menunggak. Namun, setelah

jatuh tempo, wajib pajak yang menunggak akan diberi surat. Setelah tidak ada pembayaran, objek penunggak pajak akan ditempel stiker. Jika tetap tidak membayar, reklamenya bakal dicopot. Upaya tersebut dilakukan untuk menggenjot realisasi pajak reklame dan menertibkan pembayaran pajak.

Dengan demikian, akhir tahun nanti realisasinya memenuhi target. Tahun ini pajak reklame ditarget Rp 16 miliar. Sampai saat ini, sudah terealisasi Rp 12,4 miliar atau 77,5 persen dari target. Pihaknya optimistis akhir tahun nanti target bisa tercapai. (uzi/c7/any)



SPR/100414

BERI PERINGATAN: Petugas menempelkan stiker ke reklame yang menunggak pajak di Jalan Gajah Mada kemarin (13/9).

Jawa Pos





LOEIF/DUTA

Kesebelasan sepak bola putra Sidoarjo

Optimistis Sepak Bola Juara

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dan seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada tim sepak bola putra Kabupaten Sidoarjo yang akan berlaga dalam final cabor sepak bola Porprov VIII tahun 2023 melawan tim sepak bola putra Kabupaten Kediri.

Final akan berlangsung pada hari Jumat, 15 September 2023 pukul 18.00 di Gelora Delta Sidoarjo.

Melihat penampilan laga semi final pada Selasa (12/9/23) kemarin lawan Mojokerto, Gus Muhdlor sapaan akrab Bupati Sidoarjo optimis tim sepak bola putra Sidoarjo bakal tampil juara mengalahkan

Sidoarjo bakal tampil juara menggalakan Kabupaten Kediri. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Sidoarjo untuk hadir di stadion Gelora Delta memberi dukungan yang akan menjadi energi positif bagi tim sepak bola putra Kabupaten Sidoarjo.

“Ini adalah momen bersejarah bagi Sidoarjo, dan saya yakin kita dapat meraih kemenangan jika kita bersatu. Tim sepak bola kita telah bekerja keras untuk sampai ke final, dan sekarang saatnya kita memberikan mereka dukungan tanpa syarat. Mari kita bersama-sama meriahkan pertandingan ini, dan semoga Sidoarjo bisa meraih juara!” ucap Gus Muhdlor Rabu (13/9/23)

Pertandingan final antara tim sepak bola putra Sidoarjo dan tim sepak bola putra Kabupaten Kediri akan menjadi tontonan seru dan memacu adrenalin bagi seluruh masyarakat Sidoarjo.

Semoga dukungan ini dapat memberikan semangat bagi tim sepak bola putra Kabupaten Sidoarjo untuk meraih kemenangan di final dan membawa nama baik Sidoarjo pada ajang Porprov VIII tahun ini. ● **Loe**